Penguatan Pengawasan																
Nomor	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Evidence	Bulan											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	ZI Menuju WBK dan WBBM	Pendampingan terhadap unit kerja Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam upaya memperoleh predikat unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum optimal	TARGET DALAM PK 2021 : 2 UNIT DI ITDA, 2 UNIT DI ITTU = 4 UNIT													
		Pendampingan akan dilanjutkan dan menjadi rencana aksi tahun 2021.														
2	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	Terdiri dari 2 indikator yaitu Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan ingkat Kematangan UKPBJ. Pada kedua indikator tersebut terdapat kriteria penilaian. Apabila dilihiat dari indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ terkait pemenuhan JF PBJ perlu kolaborasi antara Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk merencanakan kebutuhan JF PPBJ dan													

		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Sesuai dengan PerLKPP 5/2019 ada 9 variabel yang harus ditingkatkan kematangannya minimal 3. Untuk dapat mencapai level tersebut, harus ada kolaborasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi Tata Laksana, Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN, Bagian Pembentukan Produk Hukum dan dikawal oleh Inspektorat Utama sebab untuk mencapai tingkat kematangan level 3 di 9 variable dibutuhkan dokumen-dokumen yang merupakan kewenangan beberapa unit kerja, bukan hanya Bagian Pengadaan dan Jasa.													
3	Manajemen Risiko	a. Manajemen Risiko dalam RPJMN 2020-2024 yang mana indeks Penerapan Manajemen Risiko yaitu pada level 3 dari skala 1 s.d. 5														
		b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020, BAB 5. Pembangunan Bidang - 5.1.2. Pengarus utamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yaitu dengan Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi.													

		c. Area of Improvement atas hasil penilaian Internal Audit Capability Models (IACM) yaitu mendorong implementasi manajemen risiko di Setjen DPR RI.														